BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau, memiliki jumlah pulau yang sangat besar. Berdasarkan data SLHI 2013 yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia memiliki total 13.466 pulau dengan garis pantai sepanjang 80.791 kilometer. Negara ini menghadapi peluang besar dan sekaligus tantangan yang signifikan dalam upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Potensi alam di wilayah pesisir dan laut Indonesia sangat melimpah, menyediakan berbagai macam jasa lingkungan seperti “minyak dan gas, mineral, hasil perikanan, ekosistem terumbu karang, mangrove, dan menjadi destinasi pariwisata”. Namun, disayangkan bahwa pada peridoe sebelumnya sumber daya di wilayah pesisir belum mendapatkan perhatian pemerintah. Dengan adanya pencemaran juga ada tindakan pencurian sumber daya laut yang tidak terkontrol oleh pihak asing. Kemiskinan di wilayah pesisir juga merupakan permasalahan yang umum. Dengan meningkatnya populasi di daerah pesisir perkotaan, terjadi peningkatan yang cukup mencolok, menyebabkan semakin terbatasnya sumber daya di wilayah daratan. Oleh karena itu, wilayah pesisir dan laut bersama dengan sumber dayanya menjadi alternatif yang strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah maupun nasional di masa yang akan datang. Oleh karena itu, adalah angkah yang rasional jika dalam hal pembangun dalam jangka waktu yang panjang, pemerintah harus memfokusjan perhatiannya

terhadap pengembangan daerah pesisir. Dedikasi pemerintah terhadap hal ini tercermin dari keberlanjutan keberadaan kementerian yang fokus pada isu lingkungan hidup dan kelautan. Dalam kabinet saat ini, bahkan ditambahkan jabatan "Menteri Koordinator Maritim", menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mengelola sektor ini. Penentuan sistem melibatkan pengaitan antara pernyataan kebutuhan dengan pernyataan masalah yang bersifat spesifik, membentuk suatu rangkaian hubungan yang terstruktur. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diungkapkan (Firmansyah et al., 2012).

Saat ini, masih merupakan sumber keprihatinan bahwa sejumlah proyek pembangunan di wilayah daratan dan laut dapat berakibat buruk bagi lingkungan. Dampak ini pada akhirnya dapat merugikan kualitas lingkungan pesisir dan laut, serta berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Dampak tersebut melibatkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan, juga pemanfaatan yang berlebihan terhadap sumber daya pesisir dan laut. Kemajuan teknologi saat ini telah melibatkan perkembangan dalam teknik penangkapan ikan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan secara maksimal. Namun, dalam konteks ini, seringkali kurangnya perhatian terhadap dampak ekologisnya menjadi suatu perhatian (Palijama, 2021). Dalam kerangka ini, penting untuk mengintegrasikan langkah-langkah pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi ke dalam kebijakan dan rencana tindakan pengelolaan lingkungan untuk setiap sektor pembangunan. Selain dari permasalahan yang telah disebutkan, terdapat juga kendala terkait dengan ketidakterpaduan sistem manajemen.

Pengelolaan pesisir saat ini seringkali dilakukan secara terpisah-pisah antara sektor daratan dan sektor laut, tanpa adanya integrasi yang menyeluruh. Padahal, perlu menjadi perhatian bahwa pencemaran yang sering terjadi didaerah pesisir berawal dari aktivitas masyarakat di daerah daratan maupun laut. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam "Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatakaan bahwa pengelolaan di wilayah pesisir harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu".

Daerah pesisir adalah wilayah di mana daratan bertemu dengan laut.

Bagian ke wilayah daratan dari pesisir mencakup daerah terendam air dan kering, yang masih memperoleh dampak dari fenomena laut seperti intrusi air asin, pasang surut, angin laut. Sementara itu, bagian ke arah laut dari wilayah pesisir masih memperoleh pengaruh dari aktivitas manusia di daratan, seperti "deforestasi dan polusi, dan juga dipengaruhi oleh proses alami seperti sedimentasi dan aliran air tawar" (Selamet. 2012). Daerah pesisir merupakan sistem ekologi yang dinamis, terdiri dari komponen-komponen lahan dan perairan pesisir yang saling terhubung. Wilayah pesisir juga memiliki potensi sumber daya alam yang produktif, mencakup baik sumber daya hayati maupun non-hayati. Meskipun begitu, wilayah pesisir juga menghadapi sejumlah tantangan baik dari segi pengelolaan lingkungan maupun aspek sosial ekonomi (Fachruddin et al., 2020). Masalah kompleks yang sering dihadapi oleh wilayah yang berdekatan dengan pantai atau pesisir adalah permasalahan sampah. Keberadaan sampah laut menciptakan kekhawatiran di masyarakat karena

dampaknya yang mencemari wilayah pesisir dan laut. Sampah mengacu pada residu atau sisa-sisa yang muncul dari aktivitas manusia sehari-hari maupun yang terjadi melalui proses alam. Diprediksi indonesia menjadi urutan kedua dalam kontributor sampah plastik diantara 129 negara lainnya (Jambeck, 2015).

Menurut informasi yang diterbitkan oleh KLHK, indonesia memproduksi rata-rata sampah sekitar 175.000ton perhari atau 64 juta ton pertahun. Setiap individu menhasilkan sampah 0,7kg perhari (PPID, 2019). Dalam kerangka ini, limbah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Kelompok limbah plastik termasuk dalam kategori limbah anorganik yang sulit terurai, sehingga memerlukan pendekatan penanganan khusus. Indonesia menghadapi tantangan serius terkait masalah sampah plastik, seiring dengan hasil penelitian dari University of Georgia yang memperkirakan bahwa sekitar 322 juta ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahun di sekitar perairan Indonesia. Isu pencemaran lingkungan akibat sampah plastik semakin berkembang menjadi permasalahan yang semakin serius dalam beberapa tahun terakhir, mendorong berbagai upaya dan inisiatif di bidang pengendalian dan perawatan. Keprihatinan ini dirasakan oleh pemerintah, politisi, dan masyarakat secara keseluruhan (Permana, 2020). Dalam konteks ini, peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui kampanye penyuluhan mengenai dampak positif yang dapat dihasilkan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan potensi kebersihan lingkungan jika dikelola dengan baik (Apriliani et al., 2017).

Sampah plastik merupakan tantangan global yang dihadapi oleh banyak negara karena karakteristiknya yang sulit terurai dan setiap tahunnya selalu meningkat. Volume sampah plastik disetiap masing-masing negara berbeda satu sama lain. Volume produksi sampah plastik di seluruh dunia dari tahun 1950 hingga 2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1950, perkiraan jumlah sampah plastik yang dihasilkan global adalah sekitar 2 juta ton per tahun. Tetapi pada tahun 2015 produksi smpah global mengalami peningkatan yang sangat tinggi sekitar 190 kali lipat dari tahun sebelunya. Peningkatan ini sekitar 381 juta sampah pertahun yang pertumbuhannya rata-rata 5,8 ton pertahun (Kompas, 2019). Laporan yang dibuat oleh World Bank tahun 2016, menjelaskan bahwa sampah plastik menyumbang 12% terhadap pencemaran lingkungan. Proyeksi ini menunjukkan potensi peningkatan tingkat pencemaran lingkungan hingga mencapai sekitar 70% pada tahun 2050 (CNBC Indonesia, 2018). Keberlimpahan sumber daya di wilayah pesisir dan pantai memberikan daya tarik yang signifikan, memengaruhi faktor-faktor fisik, sosio-ekonomi, dan politik yang saling terkait. Ini menciptakan dinamika dalam sistem pantai dan mendorong upaya untuk mengelola wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, dikenal sebagai Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dan Berkelanjutan (ICZM). Tujuan dari pendekatan ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di Indonesia, dengan harapan mencapai perencanaan pengelolaan pesisir yang dapat mempercepat pertumbuhan sosio-ekonomi sambil menjaga keseimbangan ekologi. ICZM dianggap sebagai instrumen pengendalian yang dapat mengurangi tekanan ekologi dalam konteks ini (Siswanto & Nugraha, 2016).

Plastik merupakan istilah yang merujuk pada polimer, suatu material yang terbentuk dari rantai panjang karbon dan unsur lainnya seperti oksigen, nitrogen, klorin, atau belerang. Bahan ini dapat dengan mudah diolah menjadi berbagai bentuk dan dimensi. Produksi plastik melibatkan langkah polimerisasi, yakni penggabungan dan pembentukan bahan dasar plastik secara bersambungan. Plastik juga mencakup bahan tambahan nonplastik yang dikenal sebagai aditif. Aditif tersebut diperlukan untuk meningkatkan sifat khas dari plastik itu sendiri. Beberapa jenis aditif plastik termasuk pewarna, antioksidan, penyerap sinar ultraviolet, dan agen antilekat. (Shah et al., 2008).

Pembuangan sampah plastik ke perairan laut dan wilayah pesisir bukan hanya menciptakan tantangan lingkungan, tetapi juga membahayakan keberlangsungan hidup organisme di ekosistem tersebut, sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekologi. Plastik akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, dan selama proses tersebut, plastik dapat memecah menjadi ukuran yang lebih kecil, membentuk mikroplastik. Keberadaan mikroplastik ini memiliki dampak negatif pada berbagai bentuk kehidupan laut, dan telah banyak laporan yang menunjukkan efek merugikan secara fisiologis bahkan hingga bersifat mematikan (Guzzetti, E., Sureda, A., Tejada, S., & Faggio, 2018). Maka dari itu, diperlukan usaha pengelolaan sampah yang efektif untuk mencegah dampak yang merugikan. Wilayah pesisir memiliki potensi risiko pencemaran yang tinggi, mengingat sebagian besar aktivitas manusia terpusat di wilayah ini (Crossett et al., 2004).

Peningkatan produksi sampah plastik di Indonesia yang menimbulkan keprihatinan dapat dikaitkan dengan potensi pariwisata negara ini. Pada tahun

2017, jumlah total wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia mencapai 14.039.799.9 orang. Studi dari United Nations Environment Programme (UNEP) menyatakan bahwa secara rata-rata, wisatawan menghasilkan enam kali lebih banyak sampah selama periode liburan mereka (Qodriyatun, 2018). Prinsipnya, adanya sampah plastik secara signifikan menghambat kualitas pariwisata di suatu wilayah. Pemberian tanggung jawab dalam hal pengelolaan sampah diatur pada "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) dan peraturan turunannya. Wewenang dalam mengelola sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan dan kendali berada di bawah pemerintahan pusat".

Untuk menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, penting untuk mengontrol penggunaan sumber daya dan aktivitas yang memiliki potensi mencemari serta merusak lingkungan. Memantau penerapan aturan dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi langkah krusial sebagai tindakan dalam menjalankan kontrol tersebut. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UU 32/2009) bersama dengan peraturan turunannya menetapkan sejumlah ketentuan terkait larangan, kewajiban, dan/atau persyaratan, serta prosedur pengawasan dan sanksi. Pengawasan yang disebutkan di atas pada dasarnya bertujuan untuk memantau dan menjamin kepatuhan terhadap aturan mengenai larangan, kewajiban, atau persyaratan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum" (Pramudyanto, 2014).

Peraturan terkait pengawasan dalam konteks manajemen lingkungan hidup, yang disebut sebagai pengawasan lingkungan hidup, dijelaskan dalam "Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai berikut: **Pertama,** Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan wewenangnya, diwajibkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. **Kedua,** Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berhak untuk mendelegasikan wewenang pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang memiliki tanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. **Ketiga,** Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang menunjuk pejabat pengawas lingkungan hidup yang memiliki jabatan fungsional." (Pramudyanto, 2014).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut yang telah dilakukan Ditjen PPKL?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sasaran Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut melalui upaya mengurangi beban pencemaran dan menurunkan tingkat kerusakan

pada wilayah pesisir dan laut. Hal ini akan dicapai melalui kegiatan inventarisasi ekosistem dan penilaian status mutu lingkungan di daerah pesisir dan laut.

1.3.2 Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintah khususnya di dalam ilmu sosial dan ilmu politik.
b. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
c. Penelitian ini berguna untuk bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

1.3.3 Manfaat Praktis

a. Penelitian ini memiliki manfaat untuk memahami Sasaran Strategis Ditjen PPKL dalam upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Pesisir Laut.

1.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual memegang peranan penting, tidak hanya dalam memberikan kejelasan dan panduan untuk pelaksanaan magang riset, tetapi juga menetapkan batasan istilah yang terkandung dalam penelitian ini (Azwar, 2007). Definisi konseptual adalah interpretasi suatu konsep yang masih bersifat abstrak dan maknanya belum terwujud sepenuhnya, walaupun secara intuitif masih dapat dimengerti. Dalam menguraikan arah tujuan penelitian ini, saya merujuk pada definisi beberapa konsep tersebut. Konsep adalah istilah yang

terdiri dari satu kata atau lebih yang menguraikan suatu fenomena atau mengungkapkan suatu ide tertentu. Ini melibatkan persepsi atau abstraksi yang dibentuk dengan memperinci setiap aspeknya. spesifik dalam suatu penelitian tentunya melibatkan konsep dasar, dengan tujuan memberikan batasan-batasan yang terkait dengan konsep dasar dalam konteks penelitian ini (Hasan, 2018).

1.4.1 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu instrumen yang dimiliki oleh pemerintah, Hal ini berlaku tidak hanya dalam konteks pemerintahan yang terkait dengan aparat negara, melainkan juga Dalam konteks tata kelola yang melibatkan pengelolaan sumber daya publik, kebijakan merujuk pada serangkaian keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengelola dan mengatur distribusi sumber daya alam, finansial, dan sumber daya manusia untuk kepentingan publik, seperti masyarakat, penduduk, atau warga negara. Kebijakan ini merupakan hasil dari kolaborasi, perundingan, dan terkadang persaingan antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan yang mencerminkan dinamika dalam sistem politik suatu negara. Kebijakan publik mencakup baik tindakan yang diambil maupun tindakan yang tidak diambil oleh pemerintah (Dye, 2005).

Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan Tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan

dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk masyarakat, atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi bahkan kompetisi antar berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah

1.4.2 Strategi

Menurut Arifin (2004), Strategi menjadi landasan dalam mencapai tujuan organisasi dan menentukan pola gerak serta pendekatan manajemen. Ini juga merupakan rencana yang komprehensif dan terintegrasi yang mengaitkan keunggulan strategis dengan peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Effendi menyatakan bahwa strategi adalah suatu perencanaan atau rencana dan manajemen yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, dan hal tersebut hanya dapat diwujudkan melalui penerapan taktik operasional. Suatu strategi komunikasi seharusnya mencakup semua aspek yang diperlukan untuk memahami cara berkomunikasi dengan audiens target agar dapat meraih manfaat dari perspektif mereka, serta bagaimana mencapai audiens yang lebih luas dengan cara yang efektif (Effendy, 2009) (Nugroho, 2018).

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan strategi merupakan suatu kerangka perencanaan dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai

tujuan yang telah ditetepakan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam waktu yang telah ditentukan.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional berperan dalam mengoperasikan konsep-konsep yang ada untuk menjelaskan variabel yang diperlukan. Definisi operasional melibatkan indikator-indikator yang dapat diidentifikasi dan diukur, sehingga variabel-variabelnya dapat dideskripsikan dengan jelas. Definisi operasional merujuk pada penjelasan prosedur yang memungkinkan konfirmasi atau penolakan terhadap keberadaan suatu realitas tertentu sebagaimana dijelaskan menurut konsepnya. Berikut indikator variable operasionalisasi penelitan "Sasaran Strategis Ditjen PPKL Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut":

1. Sebagai inovator, motivator, dan actuating.
2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervise, koordinasi, monitoring, dan evaluasi urusan pengendalian pencemaran yang dilakukan kepada direktorat pengendalian pencemaran dan kerusakan laut dan pemerintah daerah.
3. Pelaksanan pembinaan dan pengembangan serta peningkatan kualitas pengendalian pencemaran kepada masyarakat dan stakeholder.
4. Pengawasan terhadap pengendalian pencemaran sampah plastik yang sudah berjalan diberbagai wilayah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan bagian dari tahapan pengembangan ilmu. Hal ini berarti konsep, hipotesis, atau teori mungkin telah ditemukan pada tahap sebelumnya dalam penelitian, yaitu penelitian tahap eksploratif. Memberikan penjelasan rinci tentang suatu kelompok atau fenomena sosial serta menggambarkan realitas yang kompleks agar lebih mudah dipahami.

"Penelitian kualitatif deskriptif dapat dijelaskan sebagai suatu metode pemecahan masalah yang melibatkan penyelidikan dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seperti individu, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta. Pada tahap awal, fokusnya tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara komprehensif di dalam aspek yang diselidiki, sehingga keadaan atau kondisinya menjadi jelas.". Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan ialah untuk menelusuri permasalahan yang diselidiki dengan mengklarifikasi dan mendefinisikan "bagaimana Sasaran Strategis Ditjen PPKL Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut".

1.6.2 Subyek Penelitian

Penentuan subyek dari penelitian ini berdasarkan perwakilan dari sumber-sumber yang dibutuhkan. Adapun sumber-sumber tersebut, sebagai berikut:

a. Ditjen PPKPL

b. Pemerintah daerah terkait

c. Pengelola usaha atau pariwisata di wilayah pesisir

1.6.3 Sumber Data

Data kualitatif ini berbentuk kalimat atau uraian. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang mencakup data primer dan data sekunder, Data yang ditemukan berasal dari wawancara langsung di lapangan dengan instansi pemerintahan setempat.

a. Data primer

Data primer didapatkan sevara langsung dari narasumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam pelaksanaan wawancara, beberapa narasumber yang relevan dengan judul penelitian diundang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam subjek penelitian untuk mengumpulkan data yang diinginkan. Data diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian. Wawancara yang dilakukan tidak melibatkan seluruhnya, melainkan menggunakan sampel responden yang telah diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari output instansi atau lembaga tertentu yang tidak hanya difokuskan untuk kebutuhan internal lembaga tersebut tetapi juga untuk pihak lain yang memerlukan informasi tersebut. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dasar atau kerangka penelitian yang akan digunakan

untuk membahas hasil penelitian. Dengan demikian, data sekunder yang diperoleh bersifat dokumen.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat pemecahan masalah penelitian melalui proses penelitian. Lokasi penelitian tergantung pada bidang keilmuan sebagai latar belakang penelitian atau pemusatan ilmu. Lokasi penelitian harus jelas agar penelitian dapat dilakukan secara akurat dan efektif (P Dr Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu terdapat pada di Kantor Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur Gedung B Lantai 4

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah langkah di mana data dan informasi yang relevan dikumpulkan dengan tujuan untuk mengklarifikasi tingkat keakuratan data yang akan diolah dalam analisis sesuai dengan metode yang digunakan. Proses ini dapat mencakup perolehan data primer maupun data sekunder.

1.7.1 Observasi

Prof. Heru mendefinisikan observasi sebagai berikut “Studi yang disebut sebagai observasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai dengan tujuan tertentu. Melibatkan proses mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi, observasi ini mengikuti syarat dan aturan dalam penelitian atau karya ilmiah (Heru, 2015). Hasil dari observasi ilmiah ini harus dijelaskan dengan teliti, tepat, dan akurat, dan tidak

diizinkan untuk ditambah atau dikurangi atau dibuat-buat sesuai keinginan peneliti". Dalam penelitian ini, dilakukan pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan terhadap "Sasaran Strategis Ditjen PPKL Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut".

1.7.2 Wawancara

Dalam penelitian ini, digunakan Teknik Wawancara Berstruktur dengan maksud agar data yang diperoleh dari wawancara tetap terfokus dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara merupakan bentuk interaksi percakapan yang memiliki tujuan khusus antara dua pihak, yaitu antara pewawancara yang menanyakan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban yang tepat dari sumber informasi. Teknik Wawancara Berstruktur dipakai untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena dan permasalahan yang terkait "Agenda Setting Ditjen PPKPL Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut".

1.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap krusial dalam mengevaluasi dan menguraikan data serta informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data yang diterapkan dalam metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif adalah analisis data kualitatif. Sejumlah ahli, termasuk Bondan dan Bikle, menjelaskan definisi analisis data kualitatif sebagai berikut: "upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinsiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain".

Menurut Noeng Muhadjir yang dikutip dalam (Rijali, 2019), analisis data adalah upaya sistematis dan terstruktur dalam mencari serta merapikan informasi dari catatan hasil observasi dan sumber lainnya untuk memberikan kontribusi tambahan tentang Pemahaman peneliti terhadap kasus yang diselidiki disampaikan sebagai temuan yang dapat bermanfaat bagi pihak lain. Untuk memperdalam pemahaman tersebut, analisis data diteruskan dengan upaya mencari makna. Tahapan analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Langkah awal dari analisis data yaitu terlebih dahulu mengelompokkan data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis data dengan memberikan penjelasan lebih detail dalam pembahasan penelitian. Miles dan Huberman dalam (Rijali, 2019) menjelaskan terdapat empat prosedur dalam mengkaji data pada teknik kualitatif, empat prosedur tersebut yaitu:

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

   Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan saat peneliti mengumpulkan informasi dari Direktorat PPKPL, melakukan observasi, serta melakukan wawancara dengan informan. Data yang diperoleh kemudian disederhanakan oleh peneliti dengan mengambil informasi yang relevan dengan penelitian terkait "Sasaran Strategis Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Pesisir Laut". Selain itu, dilakukan pengumpulan data analisis terkait faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

   Dalam penelitian kualitatif, Miles dan Huberman menyajikan data dalam bentuk naratif teks, disertai dengan aspek-aspek lain seperti tabel, grafik, dan diagram. Peneliti, ketika menyajikan data, melakukan deskripsi terkait dengan informasi yang ditemukan mengenai "Sasaran Strategis Ditjen PPKL Kementrian Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Pesisir Laut". (Prof. Dr. Sugiyono, 2013).

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/verification*)

   Penarikan kesimpulan dilakukan dengan bukti-bukti yang sudah ditemukan dalam penelitian lapangan, temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek dari penelitian "Sasaran Strategis Ditjen PPKL Kementrian Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Pesisir Laut". Apabila kesimpulan didukung oleh bukti yang kokoh, maka kesimpulan yang disampaikan dapat dianggap sebagai kesimpulan yang dapat dipercaya.